

BEBAN FISKAL PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS TERHADAP RUANG FISKAL APBN : TINJAUAN DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Sajad Khawarizmi Maulana Musthofa¹, Nurul Setianingrum²

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember^{1,2}

Email: sajadmaulana2@gmail.com¹, nurulsetia02@gmail.com²

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas pemerintah Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mendukung pembangunan sumber daya manusia. Namun, besarnya alokasi anggaran program ini menimbulkan perhatian terhadap dampaknya terhadap ruang fiskal APBN dan keberlanjutan kebijakan publik dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis beban fiskal MBG terhadap ruang fiskal APBN, implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan dan analisis kebijakan dengan sumber data berupa dokumen APBN, laporan pemerintah, peraturan, serta literatur ilmiah terkait. Analisis dilakukan berdasarkan konsep maqashid syariah, khususnya hifz al-nafs, hifz al-‘aql, dan hifz al-mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MBG berpotensi menjadi investasi sosial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, besarnya anggaran dapat mempersempit ruang fiskal apabila tidak disertai efisiensi, pengawasan, dan tata kelola yang baik. Dari perspektif ekonomi syariah, MBG sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik, keadilan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola, transparansi anggaran, pengawasan, serta evaluasi berkala agar program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Makan Bergizi Gratis, APBN, ruang fiskal, ekonomi syariah, maqashid syariah.

Abstract

The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a priority program of the Indonesian government aimed at improving public nutrition and supporting human resource development. However, its large budget allocation raises concerns regarding its impact on the fiscal space of the State Budget (APBN) and the sustainability of public policy from an Islamic economic perspective. This study aims to analyze the fiscal burden of MBG on APBN fiscal space, its implications for fiscal sustainability, and its compatibility with Islamic economic principles. This research employs a descriptive qualitative method through literature review and policy analysis using data from APBN documents, government reports, regulations, and relevant academic literature. The analysis is based on the maqashid sharia framework, particularly hifz al-nafs, hifz al-‘aql, and hifz al-mal. The results indicate that MBG has the potential to become a social investment in improving human resource quality. However, its large budget allocation may reduce fiscal flexibility if not supported by efficiency, supervision, and good governance. From an Islamic economic perspective, MBG aligns with public welfare, justice, and sustainability principles. Therefore, strengthening governance, budget transparency, monitoring, and periodic evaluation is necessary to ensure effective and sustainable implementation.

Keywords: Free Nutritious Meals, APBN, fiscal space, Islamic economics, maqashid sharia.

A. Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang dicanangkan pemerintah Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik, balita, dan ibu hamil. Program ini mulai dilaksanakan secara bertahap sejak 6 Januari 2025 melalui Badan Gizi Nasional dengan target awal mencapai 17.980.263 penerima manfaat hingga akhir tahun 2025. Untuk mendukung implementasinya, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025 yang sebagian besar digunakan untuk belanja bahan makanan serta dukungan operasional program¹. Pada APBN 2026, alokasi anggaran MBG meningkat secara signifikan menjadi Rp335 triliun dan hingga 9 Maret 2026 telah terealisasi sebesar Rp44,0 triliun atau 13,1% dari total pagu dengan cakupan 61,62 juta penerima manfaat². Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa MBG tidak hanya merupakan instrumen kebijakan sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari kebijakan fiskal nasional yang berimplikasi langsung terhadap struktur dan kapasitas belanja negara.

Dalam perspektif ekonomi publik, implementasi program berskala besar seperti MBG perlu dianalisis dalam kerangka ruang fiskal (*fiscal space*), yaitu kemampuan pemerintah menyediakan sumber daya anggaran untuk membiayai suatu kebijakan tanpa mengganggu stabilitas fiskal jangka menengah dan jangka panjang. Putri *et al.* (2022) menjelaskan bahwa peningkatan *fiscal space* akan memperbesar kemampuan pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal yang bersifat *counter-cyclical*, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan atau perlambatan³. Namun demikian, perluasan ruang fiskal juga memerlukan optimalisasi penerimaan negara dan penataan kembali komposisi belanja agar tidak menimbulkan tekanan terhadap keberlanjutan keuangan negara. Urgensi isu tersebut semakin relevan dalam konteks ekonomi Indonesia tahun 2026 ketika inflasi tahunan pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08%⁴, sementara Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,50% pada Juni 2026 sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi⁵. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja negara dan daerah sehingga setiap program prioritas harus dilaksanakan secara efektif dan akuntabel⁶.

Dari sisi empiris, berbagai penelitian menunjukkan bahwa program makan sekolah memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan manusia. Wall *et al.* (2022)

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, February 17). *Pemerintah salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), ini sasaran utama penerimanya*. ([Media Keuangan](#))

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, April 2). *Optimalisasi program MBG berpotensi hemat Rp20 triliun*. ([Media Keuangan](#))

³ Putri, M. A. K., Utama, C., & Mokoginta, I. S. (2022). *The impact of fiscal space on Indonesia's fiscal behavior*. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 25(2), 235–256. doi:10.21098/bemp.v25i2.1845. ([BMEB Bulletin](#))

⁴ Badan Pusat Statistik. (2026, June 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

⁵ Bank Indonesia. (2026, June 9). *BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,50%*. ([Bank Indonesia](#))

⁶ Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))

menemukan bahwa program makan sekolah berkorelasi positif dengan peningkatan hasil pendidikan peserta didik⁷, sementara Cohen *et al.* (2021) menunjukkan bahwa *universal school meals* mampu meningkatkan partisipasi makan, kualitas diet, keamanan pangan, dan sejumlah indikator akademik⁸. Temuan serupa disampaikan oleh Zenebe *et al.* (2018) yang menemukan bahwa peserta program *school feeding* memiliki status gizi, keragaman konsumsi pangan, dan tingkat kehadiran sekolah yang lebih baik dibandingkan kelompok non-penerima⁹. Lebih lanjut, Spill *et al.* (2024) melalui tinjauan sistematis pada *JAMA Network Open* menyimpulkan bahwa program makan sekolah gratis secara universal berpotensi meningkatkan partisipasi makan sekaligus memperbaiki kehadiran siswa serta sejumlah indikator kesehatan¹⁰. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa program makan bergizi tidak semata-mata berfungsi sebagai intervensi sosial jangka pendek, melainkan dapat menjadi instrumen investasi sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Konteks Indonesia juga menunjukkan kecenderungan yang serupa. Penelitian Nida dan Sari (2023) yang menggunakan data *Indonesia Family Life Survey* (IFLS) gelombang kelima menemukan bahwa program makan sekolah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan kognitif matematika siswa¹¹. Sementara itu, Desiani *et al.* (2025) melalui kajian sistematis terhadap berbagai penelitian yang terindeks dalam *PubMed*, *Scopus*, dan *ProQuest* menunjukkan bahwa intervensi makan sekolah secara umum berkontribusi terhadap peningkatan status gizi dan kualitas pembelajaran peserta didik¹². Temuan tersebut mengindikasikan bahwa investasi pada pemenuhan gizi peserta didik memiliki dampak multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berhubungan dengan peningkatan kualitas modal manusia (*human capital*) yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.

Meskipun demikian, dalam perspektif ekonomi syariah, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari besarnya manfaat yang dihasilkan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keberlanjutan. Konsep

⁷Wall, C., Tolar-Peterson, T., Reeder, N., Roberts, M., Reynolds, A., & Rico Mendez, G. (2022). *The impact of school meal programs on educational outcomes in African schoolchildren: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3666. doi:10.3390/ijerph19063666. (MDPI)

⁸Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). *Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: A systematic review. Nutrients*, 13(3), 911. doi:10.3390/nu13030911. (MDPI)

⁹Zenebe, M., Gebremedhin, S., Henry, C. J., & Regassa, N. (2018). *School feeding program has resulted in improved dietary diversity, nutritional status and class attendance of school children. Italian Journal of Pediatrics*, 44, 16. doi:10.1186/s13052-018-0449-1. (Springer)

¹⁰Spill, M. K., Trivedi, R., Thoerig, R. C., Balalian, A. A., Schwartz, M. B., Gundersen, C., Odoms-Young, A., Racine, E. F., Foster, M. J., Davis, J. S., & MacFarlane, A. J. (2024). *Universal free school meals and school and student outcomes: A systematic review. JAMA Network Open*, 7(8), e2424082. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.24082. (JAMA Network)

¹¹Nida, R., & Sari, D. D. P. (2023). *School meals program and its impact towards student's cognitive achievement. Journal of Economics Research and Social Sciences*, 7(1), 69–80. doi:10.18196/jeress.v7i1.17014. (Jurnal UMY)

¹²Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). *Efektivitas program makan gratis pada status gizi siswa sekolah dasar: Tinjauan sistematis. Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48. doi:10.33024/mnj.v7i1.17497. (Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu)

maqashid syariah menempatkan perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan akal (hifz al-‘aql), dan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai tujuan utama yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan publik. Zatadini dan Syafitri (2018) menjelaskan bahwa maqashid syariah memiliki kontribusi penting dalam kebijakan fiskal, khususnya dalam memastikan bahwa pengelolaan belanja negara dilakukan secara adil, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat¹³. Sejalan dengan itu, Hadinata (2026) menilai bahwa MBG memiliki potensi transformasional dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, namun tanpa dukungan desain fiskal yang kuat, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif, program tersebut berisiko menimbulkan beban fiskal yang sulit dipertahankan dalam jangka panjang¹⁴.

Lebih lanjut, Kiftiyah *et al.* (2025) menegaskan bahwa keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sangat dipengaruhi oleh kecukupan anggaran, konsistensi kebijakan, dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaannya¹⁵. Oleh karena itu, pembahasan mengenai MBG tidak dapat dilepaskan dari isu keberlanjutan fiskal dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Dalam konteks ini, konsep ruang fiskal sebagaimana dijelaskan oleh Putri *et al.* (2022) menjadi penting karena semakin besar alokasi anggaran yang diberikan kepada suatu program, semakin besar pula kebutuhan pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas dan stabilitas fiskal nasional¹⁶. Dengan demikian, MBG perlu diposisikan tidak hanya sebagai instrumen kesejahteraan sosial, tetapi juga sebagai bagian dari strategi fiskal yang harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengurangi kapasitas negara dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu mendapatkan perhatian akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada dampak program makan sekolah terhadap aspek gizi, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan kognitif peserta didik¹⁷¹⁸¹⁹²⁰. Di sisi lain, penelitian mengenai ruang

¹³ Zadini, N., & Syamsuri, S. (2018). *Konsep maqashid syariah menurut al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal*. *Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1–16. doi:10.29240/alfalah.v3i2.587. ([Rumah Jurnal IAIN Curup](#))

¹⁴ Hadinata, M. (2026). *Free nutritious meal policy in Indonesia under President Prabowo: A policy, fiscal, and political analysis grounded in international evidence*. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 65–78. doi:10.21787/jbp.18.2026.2896. ([Jurnal Kemendagri](#))

¹⁵ Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik*. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. doi:10.52738/pjk.v5i1.726. ([Ejurnal Pancasila](#))

¹⁶ Putri, M. A. K., Utama, C., & Mokoginta, I. S. (2022). *The impact of fiscal space on Indonesia's fiscal behavior*. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 25(2), 235–256. doi:10.21098/bemp.v25i2.1845. ([BMEB Bulletin](#))

¹⁷ Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). *Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: A systematic review*. *Nutrients*, 13(3), 911. doi:10.3390/nu13030911. ([MDPI](#))

¹⁸ Nida, R., & Sari, D. D. P. (2023). *School meals program and its impact towards student's cognitive achievement*. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 7(1), 69–80. doi:10.18196/jeress.v7i1.17014. ([Jurnal UMY](#))

¹⁹ Spill, M. K., Trivedi, R., Thoeirig, R. C., Balalian, A. A., Schwartz, M. B., Gundersen, C., Odoms-Young, A., Racine, E. F., Foster, M. J., Davis, J. S., & MacFarlane, A. J. (2024). *Universal free school meals and school and student outcomes: A systematic review*. *JAMA Network Open*, 7(8), e2424082.

fiskal lebih banyak membahas perilaku fiskal pemerintah secara umum tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas nasional dengan kebutuhan anggaran yang sangat besar²¹. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan analisis beban fiskal MBG dengan perspektif ekonomi syariah melalui pendekatan maqashid syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban fiskal Program Makan Bergizi Gratis terhadap ruang fiskal APBN serta mengevaluasi implementasinya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah guna menilai sejauh mana program tersebut mampu menghadirkan kemaslahatan sosial tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan fiskal negara. Memuat latar belakang dan isu permasalahan yang akan dianalisis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan analisis kebijakan publik. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel melalui pengolahan data statistik primer, melainkan untuk menganalisis secara komprehensif beban fiskal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), implikasinya terhadap ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial melalui interpretasi terhadap data, dokumen, dan konteks kebijakan yang relevan²². Dalam penelitian ini, fenomena yang dikaji adalah implementasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai salah satu program prioritas pemerintah yang memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan fiskal negara.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan literatur akademik. Sumber data meliputi dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, laporan Badan Gizi Nasional (BGN), publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), publikasi Bank Indonesia (BI), peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dan Program Makan Bergizi Gratis, serta artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Penggunaan berbagai sumber tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai posisi Program Makan Bergizi Gratis dalam struktur fiskal Indonesia sekaligus memastikan validitas informasi yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur (*literature review*). Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen resmi pemerintah yang memuat informasi mengenai alokasi

doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.24082. (JAMA Network)

²⁰Wall, C., Tolar-Peterson, T., Reeder, N., Roberts, M., Reynolds, A., & Rico Mendez, G. (2022). *The impact of school meal programs on educational outcomes in African schoolchildren: A systematic review*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3666. doi:10.3390/ijerph19063666. (MDPI)

²¹Putri, M. A. K., Utama, C., & Mokoginta, I. S. (2022). *The impact of fiscal space on Indonesia's fiscal behavior*. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 25(2), 235–256. doi:10.21098/bemp.v25i2.1845. (BMEB Bulletin)

²² Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. (SAGE Edge)

anggaran, realisasi belanja, arah kebijakan fiskal, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Sementara itu, penelusuran literatur dilakukan terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep ruang fiskal (*fiscal space*), keberlanjutan fiskal (*fiscal sustainability*), program bantuan sosial, kebijakan makan sekolah, serta konsep maqashid syariah dalam kebijakan publik. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari artikel ilmiah yang memiliki relevansi tinggi dengan tema penelitian dan dapat diakses melalui basis data akademik seperti Scopus, Google Scholar, Crossref, Garuda, dan SINTA.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif. Tahapan analisis dimulai dengan reduksi data, yaitu proses seleksi dan pengelompokan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya dilakukan penyajian data melalui interpretasi berbagai dokumen fiskal, laporan kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan melalui analisis kritis terhadap hubungan antara beban fiskal Program Makan Bergizi Gratis, kapasitas ruang fiskal APBN, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam menganalisis perspektif ekonomi syariah, penelitian ini menggunakan kerangka maqashid syariah yang mencakup perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), serta prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan distribusi (*al-'adl*). Kerangka tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memberikan manfaat sosial bagi masyarakat, tetapi juga memenuhi prinsip efisiensi dan keberlanjutan dalam pengelolaan keuangan negara.

Untuk meningkatkan kredibilitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang berasal dari dokumen resmi pemerintah, publikasi lembaga negara, dan hasil penelitian akademik. Teknik ini digunakan untuk meminimalkan bias interpretasi serta memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki dasar empiris dan teoritis yang kuat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai implikasi fiskal Program Makan Bergizi Gratis sekaligus menawarkan perspektif ekonomi syariah dalam mengevaluasi keberlanjutan program tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Penganggaran dan Realisasi Program Makan Bergizi Gratis

Pada tahun anggaran 2025, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan sebesar Rp71 triliun dengan target 19,47 juta penerima manfaat, sementara dalam APBN 2026 program ini dinaikkan secara signifikan menjadi Rp335 triliun untuk menjangkau 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sehingga MBG ditempatkan sebagai salah satu agenda prioritas nasional dalam kerangka APBN yang tetap dijaga sehat dan kredibel (Kementerian Keuangan RI, 2025, 2026). Secara operasional, hingga 9 Maret 2026 realisasi anggaran MBG telah mencapai Rp44,0 triliun atau 13,1 persen dari total pagu Rp335 triliun, dengan capaian 61,62 juta penerima manfaat dan 25.082 SPPG, yang menunjukkan bahwa MBG telah berkembang menjadi pos belanja negara yang sangat besar dan secara langsung memperkuat tuntutan efisiensi serta penataan prioritas dalam ruang fiskal APBN (Kementerian Keuangan RI, 2026).

Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Ruang Fiskal dan Stabilitas Ekonomi Makro

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada APBN 2026 dialokasikan sebesar Rp335 triliun dan diposisikan sebagai salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendorong ekonomi lokal; pada saat yang sama, realisasi hingga 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44,0 triliun atau 13,1 persen dari total pagu, menandakan bahwa program ini telah menjadi pos belanja yang sangat besar dalam struktur APBN dan secara logis dapat mempersempit ruang fiskal bagi belanja prioritas lain apabila tidak dikelola dengan efisien dan tepat sasaran (Kementerian Keuangan RI, 2026). Dalam konteks Inpres Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah juga menekankan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN/APBD, sehingga MBG perlu dibaca bukan hanya sebagai program sosial, tetapi juga sebagai kebijakan anggaran yang menuntut disiplin alokasi, pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja agar tidak menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan. Dari sisi makroekonomi, tekanan kehati-hatian fiskal tersebut menjadi semakin relevan karena BPS mencatat inflasi year-on-year Mei 2026 sebesar 3,08 persen, sementara Bank Indonesia pada 9 Juni 2026 menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran $2,5 \pm 1$ persen (BPS, 2026; Bank Indonesia, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang kebijakan ekonomi Indonesia saat ini tidak longgar: fiskal masih perlu ekspansif untuk mendorong kesejahteraan, tetapi ekspansi itu harus tetap selaras dengan stabilitas harga, nilai tukar, dan keberlanjutan APBN. Karena itu, MBG dapat dipahami sebagai program yang memiliki nilai masalah tinggi, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara manfaat sosial jangka panjang dan beban fiskal jangka pendek.

Perspektif Ekonomi Syariah atas Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis

Dari perspektif ekonomi syariah, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada dasarnya dapat dipahami sebagai kebijakan publik yang mengandung nilai masalah karena berorientasi pada perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan akal (*hifz al-'aql*) melalui pemenuhan gizi anak, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kerangka ini sejalan dengan pandangan Zatadini dan Syamsuri (2018) bahwa *maqashid syariah* dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan fiskal agar belanja negara tidak hanya legal secara administratif, tetapi juga adil, bermanfaat, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Namun, karena MBG telah memperoleh alokasi Rp335 triliun dalam APBN 2026 dan realisasinya per 9 Maret 2026 telah mencapai Rp44,0 triliun atau 13,1 persen dengan 61,62 juta penerima manfaat, maka aspek masalah itu harus dibaca berdampingan dengan prinsip kehati-hatian fiskal, efisiensi, dan akuntabilitas agar kebijakan tidak berubah menjadi beban anggaran yang tidak berkelanjutan. Dalam situasi inflasi Mei 2026 sebesar 3,08 persen dan BI-Rate 5,50 persen, kebijakan fiskal yang besar harus tetap dijaga selaras dengan stabilitas makroekonomi nasional.

Karena itu, MBG dalam perspektif ekonomi syariah perlu ditempatkan sebagai kebijakan yang sah secara tujuan, tetapi harus dibatasi oleh prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-kifayah* (kecukupan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta negara) sehingga tidak menimbulkan pemborosan, kebocoran, atau ketimpangan alokasi antarprioritas fiskal. Dengan kata lain, program ini tetap layak didukung karena memiliki nilai sosial yang kuat, tetapi implementasinya perlu dijaga melalui *targeting* yang tepat, pengendalian biaya logistik, pengawasan ketat, dan sinergi dengan instrumen sosial

Islam agar beban APBN tidak melampaui kapasitas fiskal negara. Dalam batas itu, MBG dapat dinilai sesuai dengan maqashid syariah bukan karena besarnya belanja, melainkan karena kemampuannya menghadirkan manfaat nyata yang efisien, adil, dan berkelanjutan bagi Masyarakat.

2. Pembahasan

Implikasi Temuan terhadap Beban Fiskal dan Ruang Fiskal APBN

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai belanja konsumtif, melainkan sebagai instrumen investasi sosial yang berpotensi memperkuat kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang; namun demikian, skala anggarannya yang sangat besar Rp335 triliun pada APBN 2026 dengan realisasi Rp44,0 triliun per 9 Maret 2026 atau 13,1 persen dari pagu menandakan bahwa program ini telah menjadi pos belanja yang serius dalam struktur APBN dan berpotensi mempersempit ruang fiskal apabila efisiensi tidak dijaga secara ketat. Karena itu, temuan ini sejalan dengan gagasan bahwa meningkatnya *fiscal space* memperbesar kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan *counter-cyclical*, tetapi pada saat yang sama menuntut penataan ulang sumber penerimaan dan subsidi agar belanja non-diskresioner tidak menekan kapasitas fiskal negara. Dalam konteks Indonesia, urgensi efisiensi tersebut juga ditekankan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, sementara Kementerian Keuangan bahkan menyebut optimalisasi program MBG berpotensi menghemat hingga Rp20 triliun; dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara manfaat sosial, efektivitas belanja, dan keberlanjutan ruang fiskal APBN.

Dari sudut pandang ekonomi syariah, hasil penelitian ini menegaskan bahwa MBG memiliki legitimasi normatif karena sejalan dengan tujuan kemaslahatan, terutama perlindungan jiwa dan akal, tetapi tetap harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan harta negara (*hifz al-mal*) agar tidak berubah menjadi pemborosan fiskal yang mengurangi kemanfaatan umum. Prinsip maqashid syariah menempatkan belanja negara sebagai instrumen untuk menghadirkan maslahat yang adil, proporsional, dan berkelanjutan, sehingga kebijakan publik yang bernilai sosial tinggi tetap wajib dibarengi tata kelola yang hemat, transparan, dan akuntabel. Hal ini menjadi semakin relevan ketika inflasi Mei 2026 berada pada 3,08 persen dan BI-Rate naik menjadi 5,50 persen, yang menunjukkan bahwa stabilitas makro masih perlu dijaga ketat; oleh sebab itu, MBG idealnya diperkuat melalui *targeting* yang lebih presisi, pengendalian biaya logistik, pengawasan kinerja, dan sinergi dengan rantai pasok lokal agar maslahat sosialnya tetap besar tanpa menimbulkan tekanan fiskal jangka Panjang.

Implikasi terhadap Kebijakan Fiskal dan Prioritas Belanja Negara

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki implikasi langsung terhadap kebijakan fiskal dan prioritas belanja negara karena alokasi anggarannya yang sangat besar, yakni Rp335 triliun dalam APBN 2026, dengan realisasi Rp44,0 triliun atau 13,1 persen hingga 9 Maret 2026. Pada satu sisi, program ini dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia dan berpotensi menciptakan efek ekonomi berganda, tetapi pada sisi lain ia juga meningkatkan tekanan terhadap ruang fiskal APBN apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang disiplin, efisien, dan tepat sasaran. Hal ini sejalan

dengan temuan Putri, Utama, dan Mokoginta (2022) bahwa peningkatan *fiscal space* memperbesar kemampuan pemerintah menjalankan kebijakan *counter-cyclical*, tetapi tetap menuntut penataan ulang penerimaan dan belanja agar stabilitas fiskal tidak terganggu. Dengan demikian, implikasi praktisnya adalah pemerintah perlu memastikan bahwa MBG tidak berdiri sebagai belanja yang menyerap ruang fiskal secara berlebihan, melainkan sebagai program prioritas yang didukung oleh mekanisme penganggaran yang produktif dan terukur.

Selain itu, implikasi fiskal MBG harus dipahami dalam konteks stabilitas makroekonomi 2026 yang masih menuntut kehati-hatian. Inflasi *year-on-year* pada Mei 2026 tercatat 3,08 persen, sementara Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,50 persen pada 9 Juni 2026 sebagai respons terhadap kebutuhan menjaga stabilitas rupiah dan inflasi. Dalam situasi seperti ini, belanja negara yang besar harus dipadukan dengan prioritas yang selektif, pengawasan yang ketat, dan sinergi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter agar tidak menambah tekanan pada harga, pembiayaan, maupun nilai tukar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi oleh kemampuan pemerintah mengelola prioritas belanja secara efisien, menjaga keberlanjutan fiskal, dan memastikan manfaat sosial program tetap sejalan dengan stabilitas ekonomi nasional.

Analisis Program Makan Bergizi Gratis dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik yang memiliki tingkat kemaslahatan yang tinggi karena secara langsung berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Dalam perspektif maqashid syariah, program ini selaras dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), mengingat kecukupan gizi berperan penting dalam mendukung kesehatan fisik, perkembangan kognitif, dan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian mengenai program makan sekolah yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas gizi, partisipasi pendidikan, dan capaian akademik peserta didik (Cohen *et al.*, 2021; Wall *et al.*, 2022). Oleh karena itu, dari sisi tujuan dan manfaat sosialnya, MBG dapat dipandang sebagai bentuk intervensi negara yang sesuai dengan prinsip masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu penerima, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas modal manusia yang menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Namun demikian, ekonomi syariah tidak hanya menilai kebijakan dari besarnya manfaat yang dihasilkan, melainkan juga dari cara kebijakan tersebut dikelola dan dibiayai. Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) menjadi sangat penting karena anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun pada APBN 2026 merupakan bagian dari amanah publik yang harus digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut Zataadini dan Syafitri (2018), maqashid syariah dalam kebijakan fiskal menuntut keseimbangan antara pencapaian kemaslahatan dan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab agar tidak menimbulkan pemborosan (*israf*) maupun ketidakadilan distribusi. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian MBG dengan ekonomi syariah tidak hanya bergantung pada keberhasilan meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima

manfaat, serta keberlanjutan fiskal program dalam jangka panjang. Apabila prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan, maka MBG tidak hanya menjadi kebijakan sosial yang efektif, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam tata kelola keuangan negara

D. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis pemerintah yang memiliki tujuan sosial yang kuat, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026, MBG menjadi salah satu program prioritas nasional yang memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan kesehatan, kualitas pendidikan, dan produktivitas generasi mendatang. Namun demikian, besarnya kebutuhan anggaran program tersebut juga menjadikan MBG sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap ruang fiskal APBN, sehingga implementasinya memerlukan pengelolaan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan agar tidak mengurangi kapasitas pemerintah dalam membiayai sektor prioritas lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara manfaat sosial dan ketahanan fiskal negara. Dalam kondisi ekonomi yang masih menghadapi tantangan inflasi, dinamika suku bunga, serta kebutuhan menjaga stabilitas makroekonomi, program ini harus dikelola melalui perencanaan anggaran yang matang, pengawasan yang ketat, dan mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, MBG dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan manusia tanpa menimbulkan tekanan fiskal yang berlebihan terhadap APBN dalam jangka menengah maupun jangka panjang.

Dari perspektif ekonomi syariah, Program Makan Bergizi Gratis pada prinsipnya sejalan dengan tujuan maqashid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan akal (hifz al-'aql) melalui peningkatan kualitas gizi masyarakat. Akan tetapi, kesesuaian tersebut harus dibarengi dengan penerapan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal), keadilan (al-'adl), dan kemaslahatan (maslahah) dalam pengelolaan anggaran negara. Oleh karena itu, keberlanjutan MBG memerlukan tata kelola yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan efisien agar manfaat sosial yang dihasilkan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengganggu stabilitas fiskal nasional. Dengan pendekatan tersebut, MBG tidak hanya menjadi instrumen kebijakan sosial, tetapi juga mencerminkan implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2026, June 2). *Inflasi year-on-year (y-on-y) pada Mei 2026 sebesar 3,08 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))
- Bank Indonesia. (2026, June 9). *BI-Rate naik 25 bps menjadi 5,50%*. ([Bank Indonesia](#))
- Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). *Universal school meals and associations with student participation, attendance, academic performance, diet quality, food security, and body mass index: A systematic review*. *Nutrients*, 13(3), 911. doi:10.3390/nu13030911. ([MDPI](#))
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications. ([SAGE Edge](#))
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). *Efektivitas program makan gratis pada status gizi siswa sekolah dasar: Tinjauan sistematis*. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48. doi:10.33024/mnj.v7i1.17497. ([Jurnal Universitas Muhammadiyah Palu](#))
- Hadinata, M. (2026). *Free nutritious meal policy in Indonesia under President Prabowo: A policy, fiscal, and political analysis grounded in international evidence*. *Jurnal Bina Praja*, 18(1), 65–78. doi:10.21787/jbp.18.2026.2896. ([Jurnal Kemendagri](#))
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. (2025). ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, February 17). *Pemerintah salurkan Makan Bergizi Gratis (MBG), ini sasaran utama penerimanya*. ([Media Keuangan](#))
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, October 6). *APBN 2026: Tujuan dan arah kebijakan*. ([Media Keuangan](#))
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026, April 2). *Optimalisasi program MBG berpotensi hemat Rp20 triliun*. ([Media Keuangan](#))
- Kiftiyah, A., Palestina, F. A., Abshar, F. U., & Rofiah, K. (2025). *Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam perspektif keadilan sosial dan dinamika sosial-politik. Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 5(1), 101–112. doi:10.52738/pjk.v5i1.726. ([Ejurnal Pancasila](#))
- Nida, R., & Sari, D. D. P. (2023). *School meals program and its impact towards student's cognitive achievement*. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 7(1), 69–80. doi:10.18196/jerss.v7i1.17014. ([Jurnal UMY](#))
- Putri, M. A. K., Utama, C., & Mokoginta, I. S. (2022). *The impact of fiscal space on Indonesia's fiscal behavior*. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 25(2), 235–256. doi:10.21098/bemp.v25i2.1845. ([BMEB Bulletin](#))
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025*. ([Database Peraturan | JDIH BPK](#))
- Spill, M. K., Trivedi, R., Thoerig, R. C., Balalian, A. A., Schwartz, M. B., Gundersen, C., Odoms-Young, A., Racine, E. F., Foster, M. J., Davis, J. S., & MacFarlane, A. J. (2024). *Universal free school meals and school and student outcomes: A systematic review*. *JAMA Network Open*, 7(8), e2424082. doi:10.1001/jamanetworkopen.2024.24082. ([JAMA Network](#))
- Wall, C., Tolar-Peterson, T., Reeder, N., Roberts, M., Reynolds, A., & Rico Mendez, G. (2022). *The impact of school meal programs on educational outcomes in African schoolchildren: A systematic review*. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(6), 3666. doi:10.3390/ijerph19063666. ([MDPI](#))

- Zenebe, M., Gebremedhin, S., Henry, C. J., & Regassa, N. (2018). *School feeding program has resulted in improved dietary diversity, nutritional status and class attendance of school children. Italian Journal of Pediatrics*, 44, 16. doi:10.1186/s13052-018-0449-1. ([Springer](#))
- Zatadini, N., & Syamsuri, S. (2018). *Konsep maqashid syariah menurut al-Syatibi dan kontribusinya dalam kebijakan fiskal. Al-Falah: Journal of Islamic Economics*, 3(2), 1–16. doi:10.29240/alfalah.v3i2.587. ([Rumah Jurnal IAIN Curup](#)).